

**EVALUASI PROGRAM BEASISWA SISWA UNGGUL PAPUA BAGI
MAHASISWA PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI PAPUA*****EVALUATION OF THE PAPUA EXCELLENCE SCHOLARSHIP PROGRAM FOR
UNIVERSITY STUDENTS AT THE PAPUA PROVINCIAL
DEPARTMENT OF EDUCATION***

**Rahmat Rizky
Hidayatullah¹**
Universitas Yapis
Papua¹
email:
arifardi689@gmail.com

Hasbi Majid²
Universitas Yapis
Papua²
email:
hasbi.madjid@gmail.com

Yetimera Wonda³
Universitas Yapis
Papua³
email:
wondamira03@gmail.com

Lakilo Yikwa⁴
Universitas Yapis
Papua⁴
email:
ennisyikwa@gmail.com

Nur Hasanah Kuan⁴
Universitas Yapis
Papua⁴
email:
nhasanah130520@gmail.com

IJI Publication
p-ISSN: 2774-1907
e-ISSN: 2774-1915
Vol. 6, No. 3, pp. 324-334
Juli 2026



Unit Publikasi Ilmiah
Intelektual Madani
Indonesia

Abstrak: Program Beasiswa Siswa Unggul Papua (PBSUP) bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Papua dengan memberikan peluang kepada siswa-siswa berprestasi dari daerah tersebut untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, baik di dalam maupun luar Papua, namun dalam pelaksanaannya masih menghadapi tantangan pada aspek kebijakan, pendanaan, tata kelola, administrasi, koordinasi, serta monitoring dan evaluasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Beasiswa Siswa Unggulan Papua bagi Mahasiswa pada Dinas Pendidikan Papua. Penelitian ini menggunakan pendekatan *mix method*. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, survei, dan telaah dokumen dengan informan penelitian terdiri dari Kepala Bidang Program dan Perencanaan, Staf Pelaksana Bagian Beasiswa, penerima beasiswa mahasiswa. Data hasil penelitian yang diperoleh kemudian dianalisis dengan tahapan, yakni reduksi data, penyajian data, penarikan Kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Beasiswa Siswa Unggul Papua (SUP) telah berkontribusi dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi dan kualitas sumber daya manusia orang asli Papua melalui dukungan pembiayaan pendidikan yang berlandaskan Peraturan Gubernur Papua Nomor 51 Tahun 2021. Meskipun demikian, implementasi program masih menghadapi berbagai kendala, terutama keterbatasan pendanaan akibat perubahan mekanisme Dana Otonomi Khusus sejak tahun 2022, yang berdampak pada keterlambatan penyaluran beasiswa. Selain itu, pelaksanaan program juga dipengaruhi oleh permasalahan administrasi, seperti akurasi data penerima dan proses verifikasi yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan perencanaan anggaran, peningkatan transparansi pengelolaan, serta perbaikan sistem administrasi dan pendataan agar pelaksanaan program dapat berlangsung lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Evaluasi; Beasiswa; Mahasiswa; Model Evaluasi CIPP.

Abstract: The Papua Outstanding Student Scholarship Program (PBSUP) aims to improve the quality of human resources in Papua by providing opportunities for high-achieving students from the region to pursue higher education, both within and outside Papua; however, its implementation still faces challenges in the areas of policy, funding, governance, administration, coordination, and monitoring and evaluation. Therefore, this study aims to evaluate the Papua Outstanding Student Scholarship Program for university students administered by the Papua Education Agency. This study employs a mixed-methods approach. Data collection techniques included in-depth interviews, surveys, and document analysis, with research informants comprising the Head of the Program and Planning Division, staff from the Scholarship Section, and student scholarship recipients. The research data obtained was then analyzed in stages: data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results indicate that the Papua Outstanding Student Scholarship (SUP) Program has contributed to improving access to higher education and the quality of human resources among Indigenous Papuans through educational funding support based on Papua Governor Regulation No. 51 of 2021. Nevertheless, the program's implementation still faces various challenges, particularly funding constraints resulting from changes to the Special Autonomy Fund mechanism since 2022, which have led to delays in scholarship disbursements. In addition, program implementation is also affected by administrative issues, such as inaccuracies in recipient data and a verification process that is not yet optimal. Therefore, it is necessary to strengthen budget planning, increase transparency in management, and improve administrative and data collection systems so that program implementation can be more effective, targeted, and sustainable.

Keywords: Evaluation; Scholarships; Students; CIPP Evaluation Model.

PENDAHULUAN

Program beasiswa di lembaga pendidikan, terutama di perguruan tinggi,

merupakan inisiatif penting untuk membantu mahasiswa menyelesaikan pendidikan mereka. Beasiswa tersebut disediakan oleh

pemerintah dan sektor swasta, dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh calon penerima, termasuk kriteria seperti indeks prestasi akademik, pendapatan orang tua, jumlah anggota keluarga, dan semester yang sudah ditempuh. Dengan banyaknya pelamar dan kompleksitas proses seleksi, tidak semua mahasiswa yang mengajukan permohonan dapat diterima. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan sistem pendukung keputusan yang mampu merekomendasikan penerima beasiswa (Indra Borman, 2020).

Beasiswa merupakan dukungan finansial yang bertujuan untuk meringankan biaya pendidikan individu di berbagai jenjang, dari pendidikan dasar hingga tinggi. Tujuan utama program beasiswa adalah memberikan kesempatan kepada mereka yang berpotensi akademis baik atau yang membutuhkan dukungan finansial agar dapat melanjutkan pendidikan tanpa terhambat oleh masalah ekonomi (Utomo, 2020). Sumber beasiswa berasal dari pemerintah, institusi pendidikan, organisasi non-pemerintah, dan perusahaan swasta, dengan persyaratan yang bervariasi. Jenis beasiswa juga berbeda, dari beasiswa penuh yang mencakup seluruh biaya pendidikan hingga beasiswa parsial yang hanya menanggung sebagian biaya (Jubaidah, 2024). Proses pendaftaran dan seleksi biasanya sangat kompetitif, sehingga calon penerima perlu mempersiapkan dokumen serta memenuhi kriteria akademik dan non-akademik yang ditentukan.

Salah satu program beasiswa yang dikaji adalah Beasiswa Siswa Unggul Papua (PBSUP), yang diatur dalam Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua, dan diperbarui melalui Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2021. Program ini bertujuan mendukung pendidikan pelajar Papua yang memiliki prestasi akademik baik dan potensi untuk berkembang (Otto, 2023). Fokus PBSUP adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Papua dengan memberi

kesempatan bagi siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat lebih tinggi, baik di dalam maupun di luar Papua. Program ini menyediakan dukungan biaya pendidikan, biaya hidup, dan fasilitas lainnya agar penerima dapat fokus pada prestasi akademik. Selain itu, inisiatif ini bertujuan menciptakan generasi yang mampu membawa perubahan positif di Papua melalui pengembangan keterampilan dan pengetahuan.

Sejak 2009, Pemerintah Provinsi Jayapura telah memberikan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang melanjutkan pendidikan tinggi, baik di Papua maupun di luar. Inisiatif ini didorong oleh semangat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 22, yang mewajibkan pemerintah daerah menyediakan jaminan sosial dalam kerangka otonomi daerah. Meski demikian, perubahan ini membawa tantangan terhadap tata kelola, kebijakan, dan mekanisme penyaluran beasiswa. Meskipun program ini memiliki tujuan positif, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti penyaluran dana yang terlambat, kurangnya informasi jelas bagi penerima, dan lemahnya sistem pengawasan.

Program Beasiswa Siswa Unggul Papua merupakan kebijakan strategis Pemerintah Provinsi Papua untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat lokal. Sejak 2021, pengelolaan program ini telah dialihkan kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kota Jayapura berdasarkan Peraturan Gubernur Papua Nomor 51 Tahun 2021. Pada awalnya, penyaluran dana beasiswa berjalan lancar.

Evaluasi penyaluran dana beasiswa oleh BPSDM dan Dinas Pendidikan Provinsi Papua didasarkan pada pengelolaan beasiswa dari dana Otonomi Khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2001, yang berlaku sejak 2002 hingga 2021. Beasiswa ini juga tercantum dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua untuk periode 2013-2018 dan 2018-2023. Peraturan Daerah Khusus yang diterapkan pada 2014 mengatur pembiayaan program-program strategis di Papua, termasuk beasiswa. Setelah pengelolaan beasiswa berpedoman pada regulasi tersebut, instansi pengelola administrasi mengalami pergeseran ke beberapa organisasi perangkat daerah, sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja.

Sejak 2020, BPSDM Provinsi Papua mengelola program beasiswa tersebut. Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 beserta peraturan turunannya, Pemerintah Pusat mulai menetapkan plafon anggaran dan menyalurkan dana langsung ke setiap provinsi dan kabupaten/kota di Tanah Papua. Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi Papua tidak lagi berperan sebagai distributor dana Otonomi Khusus, melainkan setara dengan kabupaten/kota lain di Tanah Papua.

Pada Oktober 2021, BPSDM mengajukan usulan anggaran untuk Beasiswa Siswa Unggul Papua tahun anggaran 2022, mencakup 3.891 mahasiswa dengan total anggaran sebesar Rp. 601.000.000.000. Usulan ini menjadi bagian dari rancangan anggaran yang diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Papua. Dewan kemudian menetapkan anggaran untuk beasiswa sebesar Rp. 380.000.000.000, yang terdiri dari Rp. 300.000.000.000 dari dana cadangan dan Rp. 80.000.000.000 dari Spesifik Grant Otonomi Khusus. Meski begitu, meski anggaran tersebut tidak sesuai dengan usulan, BPSDM tetap melanjutkan penyaluran sesuai prosedur yang ditetapkan.

Tahapan penyaluran dana diajukan oleh Sekretaris Daerah kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk pencairan bertahap dari kas umum Pemerintah Provinsi Papua ke rekening pengelolaan beasiswa, yang selanjutnya disalurkan ke lembaga pendidikan atau penerima beasiswa. Kekurangan dana

yang diperlukan telah diajukan dalam rencana perubahan anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 274.000.000.000, namun proses sidang perubahan anggaran tersebut tidak terlaksana. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi Papua menetapkan Peraturan Gubernur tentang perubahan anggaran pada November 2022, dengan alokasi tambahan untuk beasiswa sebesar Rp. 150.000.000.000, meskipun terdapat tunggakan beasiswa yang belum terbayar.

Dalam upaya menangani tunggakan beasiswa tahun anggaran 2022, Gubernur Papua melalui Sekretaris Daerah telah meminta tambahan dana kepada Pemerintah Pusat pada awal Januari 2023. Kementerian Dalam Negeri merespons bahwa tunggakan beasiswa akan dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi Papua untuk diselesaikan menggunakan anggaran tahun 2023. Pada April 2023, SP2D diterbitkan untuk menyelesaikan tunggakan beasiswa, dan pembayaran dilakukan dari April hingga Juni 2023.

Sejak 1 Januari 2023, Pemerintah Provinsi Papua tidak lagi mengalokasikan dana untuk program Beasiswa Siswa Unggul Papua, dan data penerima telah divalidasi serta diserahkan kepada pejabat di Tanah Papua. Untuk memastikan keberlanjutan program, Pemerintah Provinsi Papua meminta agar pengelolaan beasiswa dilanjutkan oleh masing-masing pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangan. Dengan pengalihan kewenangan ini, tantangan baru muncul, termasuk keterlambatan pencairan dana yang dapat mengganggu pembayaran biaya pendidikan mahasiswa.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian ini Adalah untuk mengevaluasi Program Beasiswa Siswa Unggul Papua yang dikelola Dinas Pendidikan Provinsi Papua," dan menilai efektivitas pelaksanaan program setelah perpindahan kewenangan pengelolaan dari BPSDM ke Dinas Pendidikan, serta

mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan yang ada.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian evaluasi yang bertujuan untuk menilai efektivitas program beasiswa bagi mahasiswa Papua dan dampaknya terhadap pendidikan, prestasi akademik, dan kesejahteraan sosial. Fokus utama dari evaluasi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana program beasiswa berhasil mencapai tujuannya, seperti peningkatan jumlah mahasiswa berprestasi dan kualitas hidup penerima. Penelitian ini berlandaskan pada teori evaluasi kebijakan, di mana keberhasilan program diukur melalui indikator yang telah ditetapkan, termasuk akses pendidikan, prestasi akademik, serta dampak sosial-ekonomi. Model Evaluasi CIPP (Stufflebeam et al., 2000) digunakan dengan mempertimbangkan empat elemen evaluasi, yakni *Context*, *Input*, *Process*, dan *Product*.

Penelitian ini difokuskan pada evaluasi program beasiswa yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi Papua, dengan penekanan pada pengaruh beasiswa terhadap aspek *context*, *input*, *process*, dan *product*. Informan dalam penelitian ini mencakup pejabat dari Dinas Pendidikan, pengelola program beasiswa, serta mahasiswa penerima beasiswa. Data yang digunakan meliputi kuantitatif dan kualitatif; data kuantitatif mencakup jumlah penerima beasiswa, distribusi, IPK, dan partisipasi akademik, sedangkan data kualitatif meliputi persepsi mahasiswa dan pandangan pejabat mengenai dampak beasiswa. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan survei, sementara data sekunder diambil dari dokumen resmi Dinas Pendidikan. Teknik pengumpulan data meliputi survei dengan kuesioner, wawancara mendalam, dan pengumpulan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan mereduksi data untuk menyederhanakan informasi, menyusun data

secara terstruktur menggunakan matrik dan grafik, serta menarik kesimpulan.

HASIL DAN DISKUSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas Program Beasiswa Siswa Unggul Papua (SUP) dengan menganalisis indikator seperti akses pendidikan, peningkatan prestasi akademik, dan dampak sosial-ekonomi bagi penerima manfaat. Menggunakan Model Evaluasi CIPP (*Context*, *Input*, *Process*, *Product*) yang dikembangkan oleh Stufflebeam et al. (2000), penelitian ini memberikan analisis menyeluruh tidak hanya pada hasil akhir tetapi juga pada seluruh proses program. Dalam aspek *context*, evaluasi mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan yang mendasari pembentukan program, sementara aspek *input* menilai kesiapan sumber daya dan strategi pelaksanaan. Aspek *process* berfokus pada kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan serta faktor pendukung dan hambatan yang muncul. Terakhir, aspek *product* mengukur hasil dan dampak program. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan wawasan mendalam mengenai efektivitas program beasiswa dan rekomendasi untuk peningkatan keberlanjutan serta kualitas pelaksanaannya.

Evaluasi Konteks (*Context*)

Temuan penelitian mengenai Program Beasiswa Siswa Unggul Papua (SUP) dari aspek evaluasi konteks (*context*) menunjukkan adanya keselarasan yang substansial antara kebutuhan masyarakat, tujuan kebijakan, dan pelaksanaan program tersebut. Analisis ini dapat dijelaskan melalui teori evaluasi kebijakan model CIPP (*Context*, *Input*, *Process*, *Product*) yang diperkenalkan oleh Stufflebeam (1971). Model CIPP menekankan bahwa evaluasi suatu program tidak hanya terfokus pada hasil akhir, tetapi juga mencakup penilaian terhadap konteks, sumber daya yang digunakan, proses pelaksanaan, dan

pencapaian program. Terkait dengan aspek konteks, Program Beasiswa SUP menunjukkan bahwa kebijakan ini muncul dari kebutuhan mendasar masyarakat Papua, khususnya dalam mengatasi keterbatasan akses terhadap pendidikan tinggi untuk Orang Asli Papua (OAP). Hal ini sejalan dengan pandangan Stufflebeam yang menyatakan bahwa suatu program publik harus dirancang berdasarkan identifikasi kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh kelompok sasaran.

Dari sudut pandang teori pembangunan sumber daya manusia (*human capital theory*) yang diajukan oleh Becker (1964), penyediaan beasiswa pendidikan dapat dipahami sebagai bentuk investasi pemerintah dalam peningkatan kualitas individu, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Program SUP tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan biaya pendidikan, namun juga ditujukan untuk menciptakan generasi Papua yang kompeten dan mampu berkontribusi dalam pembangunan daerah. Dengan demikian, kebijakan beasiswa ini berfungsi sebagai investasi jangka panjang dalam peningkatan kapasitas masyarakat lokal.

Manfaat program bagi mahasiswa OAP yang mengalami keterbatasan ekonomi dapat dianalisis dengan menggunakan konsep keadilan sosial dalam kebijakan publik. Menurut Rawls (1971), kebijakan publik yang adil harus dapat memberikan kesempatan yang lebih besar kepada kelompok yang memiliki keterbatasan, sehingga tercipta kesetaraan kesempatan. Dalam konteks Program SUP, pemberian akses pendidikan tinggi kepada mahasiswa OAP merupakan bentuk intervensi pemerintah untuk mengurangi kesenjangan pendidikan yang disebabkan oleh faktor ekonomi maupun kondisi geografis Papua. Oleh karena itu, program ini tidak hanya berfungsi sebagai

bantuan finansial, melainkan juga sebagai instrumen untuk pemerataan pembangunan.

Namun, temuan yang berkaitan dengan kendala administratif, pengelolaan data penerima, koordinasi antarinstansi, serta keterlambatan dalam pencairan dana menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh tujuan program, tetapi juga oleh kapasitas dalam implementasi. Analisis ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edwards III (1980), yang menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Dalam pelaksanaan Program SUP, kendala yang terkait dengan pendataan dan koordinasi menunjukkan bahwa aspek komunikasi dan struktur birokrasi perlu diperkuat agar proses implementasi dapat berjalan lebih optimal.

Selain itu, temuan terkait dengan upaya Dinas Pendidikan dalam melakukan pembaruan data dan berkoordinasi dengan perguruan tinggi mengindikasikan adanya komitmen dari pelaksana untuk menjaga ketepatan sasaran program. Hal ini sejalan dengan pandangan Edwards III bahwa keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kemampuan organisasi pelaksana dalam mengelola sumber daya dan menjalankan prosedur secara konsisten. Dengan adanya mekanisme pembaruan data dan pengawasan, program ini memiliki peluang yang lebih besar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa Program Beasiswa Siswa Unggul Papua merupakan kebijakan publik yang didasarkan pada kebutuhan dan tujuan pembangunan yang kuat. Program ini berhasil memberikan kontribusi terhadap peningkatan akses pendidikan tinggi bagi OAP sebagai bentuk investasi dalam sumber daya manusia. Namun, keberhasilan jangka panjang program ini sangat bergantung pada penguatan aspek implementasi, khususnya dalam sistem

pendataan, koordinasi kelembagaan, transparansi pengelolaan, dan ketepatan distribusi bantuan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas manajemen program menjadi faktor penting agar manfaat beasiswa dapat dirasakan secara optimal dan berkelanjutan.

Evaluasi Masukan (*Infut*)

Temuan penelitian mengenai evaluasi Program Beasiswa Siswa Unggul Papua (SUP) dari aspek evaluasi masukan (*infut*) menunjukkan bahwa keberhasilan program ini sangat dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya pendukung, yang mencakup aspek pendanaan, kelembagaan, serta sistem administrasi. Analisis ini dapat diilustrasikan melalui model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) yang diperkenalkan oleh Stufflebeam (1971). Dalam konteks model CIPP, aspek input berfungsi sebagai alat untuk menilai strategi, sumber daya, dan kapasitas organisasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan program. Dari sudut pandang ini, keberadaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) sebagai sumber pembiayaan utama menunjukkan bahwa Program SUP memiliki dukungan sumber daya yang cukup memadai pada tahap awal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Orang Asli Papua (OAP). Namun, perubahan kebijakan fiskal dan pengurangan alokasi anggaran menunjukkan bahwa kesiapan input program belum sepenuhnya mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan lingkungan kebijakan.

Temuan yang berkaitan dengan keterbatasan anggaran pasca perubahan kebijakan Otsus dapat dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edwards III (1980). Teori ini menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Dalam konteks

Program SUP, faktor sumber daya menjadi elemen yang paling krusial. Edwards III menekankan bahwa kebijakan yang memiliki tujuan yang jelas tidak akan dapat diimplementasikan secara efektif tanpa dukungan sumber daya yang memadai, termasuk anggaran, tenaga pelaksana, dan fasilitas pendukung. Keterbatasan dana yang mengakibatkan keterlambatan dalam pembayaran beasiswa menunjukkan bahwa aspek sumber daya finansial merupakan hambatan utama dalam menjaga kesinambungan pelaksanaan program.

Lebih lanjut, perubahan kewenangan pengelolaan program dari pemerintah provinsi ke kabupaten/kota menunjukkan tantangan dalam aspek struktur birokrasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa proses transisi kelembagaan belum sepenuhnya didukung oleh kesiapan administrasi, yang menyebabkan ketidakjelasan bagi mahasiswa terkait mekanisme pencairan dan pengelolaan beasiswa. Hal ini sejalan dengan pandangan Hill dan Hupe (2002) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan proses kompleks yang melibatkan berbagai aktor dan tingkatan pemerintahan. Perubahan struktur kelembagaan memerlukan koordinasi yang kuat untuk mencegah terjadinya kesenjangan antara tujuan kebijakan dan pelaksanaan di tingkat operasional.

Selanjutnya, kendala dalam koordinasi antara bidang akademik, keuangan, dan tim verifikasi data dapat dianalisis melalui teori kapasitas kelembagaan (*institutional capacity theory*). Menurut Honadle (1981), kapasitas kelembagaan mencakup kemampuan organisasi dalam merencanakan, mengelola sumber daya, melakukan koordinasi, serta menjalankan fungsi pelayanan publik secara efektif. Dalam konteks Program SUP, meskipun terdapat struktur pengelolaan dan mekanisme administrasi yang ada, masih terdapat keterbatasan dalam hal koordinasi dan pengelolaan data penerima. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas organisasi

pelaksana perlu diperkuat agar mampu menghadapi kompleksitas program, terutama mengingat jumlah penerima yang besar dan variasi kebutuhan mahasiswa baik di dalam maupun di luar negeri.

Temuan yang menyoroti pentingnya pengelolaan data penerima juga dapat dikaji melalui konsep *good governance* yang diusulkan oleh United Nations Development Programme (UNDP, 1997). Prinsip-prinsip *good governance* menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan responsivitas dalam penyelenggaraan kebijakan publik. Dalam pelaksanaan Program SUP, akurasi data penerima menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa bantuan dapat diberikan secara tepat sasaran. Oleh karena itu, pembaruan data secara berkala dan peningkatan koordinasi dengan perguruan tinggi merupakan upaya yang diperlukan untuk meningkatkan akuntabilitas program. Namun, jika sistem informasi dan koordinasi belum berjalan secara optimal, risiko keterlambatan dan ketidaktepatan dalam penyaluran bantuan tetap dapat terjadi.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Program Beasiswa Siswa Unggul Papua memiliki dasar input yang cukup kuat melalui dukungan kebijakan dan sumber pembiayaan pada periode awal pelaksanaannya. Meskipun demikian, keberlanjutan program ini masih dipengaruhi oleh kapasitas pemerintah dalam mengelola perubahan kebijakan, menyediakan sumber pembiayaan yang stabil, serta memperkuat kapasitas kelembagaan. Dengan demikian, evaluasi aspek input menunjukkan bahwa peningkatan efektivitas Program SUP tidak hanya memerlukan tambahan anggaran, tetapi juga membutuhkan reformasi dalam manajemen program melalui perencanaan yang adaptif, koordinasi antarinstansi yang lebih baik, sistem data yang terintegrasi, serta peningkatan kapasitas organisasi pelaksana agar tujuan peningkatan kualitas SDM OAP dapat tercapai secara berkelanjutan.

Evaluasi Proses (*Process*)

Temuan penelitian mengenai pelaksanaan Program Beasiswa Siswa Unggul Papua (SUP) dari evaluasi proses (*process*) menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi program tidak hanya ditentukan oleh keberadaan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kapasitas organisasi, koordinasi antaraktor, serta kemampuan administrasi dalam menjalankan kebijakan. Temuan ini dapat dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh George C. Edwards III (1980), yang menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi.

Berdasarkan perspektif Edwards III, kendala keterlambatan pencairan dana dalam Program Beasiswa SUP menunjukkan adanya persoalan pada aspek struktur birokrasi dan komunikasi antarorganisasi. Meskipun prosedur administrasi telah tersedia, proses yang panjang serta ketidaklengkapan dokumen mahasiswa menunjukkan bahwa mekanisme pelayanan belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Dalam teori Edwards III, struktur birokrasi yang terlalu kompleks dapat menyebabkan proses implementasi menjadi lambat karena adanya banyak tahapan yang harus dilalui. Oleh karena itu, penyederhanaan prosedur administrasi menjadi penting agar kebijakan dapat diterima dan dirasakan manfaatnya secara tepat waktu oleh kelompok sasaran.

Selain itu, temuan mengenai belum optimalnya koordinasi antara Dinas Pendidikan, perguruan tinggi, dan pengelola program memperlihatkan pentingnya faktor komunikasi dalam implementasi kebijakan. Edwards III menjelaskan bahwa komunikasi yang efektif diperlukan agar tujuan kebijakan,

prosedur pelaksanaan, dan tanggung jawab setiap aktor dapat dipahami secara sama. Dalam konteks Program SUP, permasalahan seperti mahasiswa yang pindah perguruan tinggi atau tidak aktif tetapi tidak segera dilaporkan menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem komunikasi dan pertukaran informasi antarlembaga. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan ketidaktepatan data penerima dan menghambat efektivitas penyaluran bantuan.

Temuan penelitian juga dapat dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn (1975), yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antarorganisasi, kondisi lingkungan sosial-politik, serta sikap pelaksana kebijakan. Dalam konteks Program Beasiswa SUP, standar dan tujuan program telah dirancang dengan jelas, yaitu meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi Orang Asli Papua (OAP). Namun, keterbatasan sumber daya, terutama dalam aspek anggaran, sistem informasi, dan kapasitas pengawasan, menyebabkan pelaksanaan program belum mencapai hasil yang optimal.

Permasalahan monitoring dan verifikasi yang belum menyeluruh juga menunjukkan adanya keterbatasan sumber daya dalam implementasi program. Menurut Van Meter dan Van Horn, ketersediaan sumber daya manusia maupun finansial merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan kebijakan. Dalam Program SUP, keterbatasan jumlah pengelola serta luasnya cakupan penerima beasiswa menyebabkan proses pengawasan belum dapat dilakukan secara maksimal. Akibatnya, potensi kesalahan data penerima, keterlambatan administrasi, dan ketidaksesuaian status mahasiswa masih dapat terjadi.

Selanjutnya, temuan mengenai dampak keterlambatan pencairan dana terhadap

keberlangsungan studi mahasiswa menunjukkan bahwa implementasi program belum sepenuhnya memenuhi prinsip efektivitas pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan konsep evaluasi kebijakan William N. Dunn (2003), yang menyatakan bahwa evaluasi program harus melihat beberapa aspek, seperti efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Dari aspek efektivitas, Program SUP telah memberikan manfaat dalam membuka akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa OAP, tetapi dari aspek efisiensi dan responsivitas masih terdapat hambatan akibat prosedur administrasi yang panjang dan lambatnya pelayanan pencairan dana.

Selain itu, temuan penelitian dapat dikaitkan dengan model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) yang dikembangkan oleh Stufflebeam (1971). Dalam aspek proses (*process evaluation*), keberhasilan program sangat bergantung pada bagaimana kegiatan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Kendala administrasi, lemahnya koordinasi, dan keterbatasan monitoring menunjukkan bahwa aspek proses dalam Program SUP masih membutuhkan perbaikan. Evaluasi proses tidak hanya menilai apakah kegiatan telah dilakukan, tetapi juga melihat hambatan yang muncul selama implementasi serta strategi perbaikan yang diperlukan.

Berdasarkan analisis teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa Program Beasiswa Siswa Unggul Papua telah memiliki tujuan dan prosedur yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan Orang Asli Papua, tetapi implementasinya masih menghadapi tantangan pada aspek administrasi, komunikasi antarorganisasi, koordinasi, dan kapasitas pengawasan. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak cukup hanya dengan menyediakan anggaran dan regulasi, tetapi membutuhkan sistem implementasi yang efektif melalui penyederhanaan birokrasi, penguatan sistem

informasi, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta pengembangan mekanisme monitoring yang lebih komprehensif. Dengan demikian, Program SUP dapat berjalan lebih transparan, tepat sasaran, dan berkelanjutan dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia Papua.

Evaluasi Produk (*Product*)

Temuan hasil penelitian mengenai Program Beasiswa Siswa Unggul Papua (SUP) dari aspek evaluasi produk (*product*) menunjukkan bahwa program ini memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Orang Asli Papua (OAP) melalui perluasan akses pendidikan tinggi. Namun, keberhasilan program tidak hanya dapat diukur dari kuantitas mahasiswa yang memperoleh pendidikan, melainkan juga dari kapasitas lulusan untuk berkontribusi terhadap pembangunan daerah setelah menyelesaikan studi. Temuan ini dapat dianalisis melalui perspektif teori modal manusia (*human capital theory*) yang diperkenalkan oleh Becker (1964) dan Schultz (1961), yang berargumen bahwa pendidikan merupakan sebuah investasi dalam sumber daya manusia yang berpotensi meningkatkan pengetahuan, keterampilan, produktivitas, serta kapasitas individu untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi dan sosial.

Dalam konteks Program Beasiswa SUP, penyediaan akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa OAP mencerminkan investasi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas modal manusia Papua. Data menunjukkan bahwa lulusan program ini telah berkarir sebagai dosen, dokter, dan insinyur, yang menunjukkan bahwa investasi pendidikan melalui program beasiswa telah berhasil meningkatkan kapasitas individu untuk memberikan manfaat sosial bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan Becker (1964) bahwa peningkatan pendidikan dan keterampilan seseorang dapat

meningkatkan kemampuan produktif yang berdampak positif terhadap pembangunan masyarakat secara keseluruhan.

Namun, penelitian juga mengidentifikasi bahwa manfaat program belum sepenuhnya optimal, dikarenakan sebagian lulusan memilih untuk bekerja di luar Papua. Fenomena ini dapat dianalisis dengan konsep *brain drain* atau migrasi tenaga terdidik. Sebagaimana diuraikan dalam teori migrasi tenaga kerja oleh Todaro dan Smith (2015), keputusan individu untuk berpindah tempat kerja dipengaruhi oleh perbedaan dalam kesempatan ekonomi, tingkat pendapatan, serta kondisi pasar kerja antara daerah asal dan daerah tujuan. Dalam konteks Program SUP, meskipun pemerintah telah berhasil meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat Papua, keterbatasan lapangan kerja, peluang karier, dan insentif profesional di Papua menyebabkan sebagian lulusan memilih untuk mengembangkan karier di wilayah lain yang menawarkan peluang yang lebih baik.

Temuan mengenai keterhubungan yang belum optimal antara program beasiswa dan dunia kerja juga dapat dianalisis dengan menggunakan teori *link and match* antara pendidikan dan dunia kerja. Menurut konsep ini, keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh proses pembelajaran, tetapi juga oleh kemampuan sistem pendidikan dalam mempersiapkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Program beasiswa yang hanya fokus pada pembiayaan pendidikan tampaknya tidak memadai untuk menjamin keberhasilan lulusan dalam memasuki dunia kerja. Oleh karena itu, penting adanya penguatan program pendampingan alumni, pelatihan keterampilan kerja, sertifikasi kompetensi, dan program magang sebagai aspek transisi dari pendidikan menuju pekerjaan yang lebih efektif.

Di samping itu, temuan terkait harapan alumni akan adanya pendampingan setelah lulus dapat dikaji melalui perspektif evaluasi

program model CIPP (Context, Input, Process, Product) yang dikembangkan oleh Stufflebeam (1971). Dalam aspek evaluasi produk, keberhasilan program tidak hanya dilihat dari jumlah mahasiswa yang lulus, tetapi juga dari dampak jangka panjang yang dihasilkan. Meskipun tingkat kelulusan penerima beasiswa menunjukkan bahwa program telah menghasilkan keluaran (*output*) yang baik, dampak (*outcome*) program masih menghadapi tantangan karena belum semua lulusan mampu terserap dalam dunia kerja atau kembali memberikan kontribusi langsung kepada daerah asal mereka.

Selanjutnya, keberhasilan dan kendala Program SUP dapat dianalisis melalui teori implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh George C. Edwards III (1980). Edwards menjelaskan bahwa keberhasilan suatu kebijakan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Dalam konteks ini, program telah memiliki sumber daya berupa pembiayaan pendidikan dan dukungan kelembagaan yang memungkinkan mahasiswa menyelesaikan studi. Meskipun demikian, aspek implementasi masih perlu diperkuat, terutama dalam penyediaan layanan pasca-kelulusan. Kurangnya mekanisme komunikasi dan koordinasi antara pengelola beasiswa, alumni, serta sektor dunia kerja mengakibatkan potensi lulusan belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk pembangunan di Papua.

Temuan mengenai adanya mahasiswa yang tidak menyelesaikan studi akibat kesulitan adaptasi dan permasalahan ekonomi juga menunjukkan bahwa keberhasilan program memerlukan dukungan yang lebih komprehensif. Hal ini sejalan dengan pendekatan layanan dukungan mahasiswa dalam pendidikan tinggi yang menekankan bahwa keberhasilan mahasiswa tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan akademik, tetapi juga oleh dukungan sosial, psikologis, dan ekonomi sepanjang masa studi. Program

beasiswa yang hanya menyediakan pembiayaan pendidikan tanpa adanya dukungan pendampingan berpotensi menghadapi risiko mahasiswa terhambat dalam menyelesaikan studi mereka.

Berdasarkan analisis dari teori-teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa Program Beasiswa Siswa Unggul Papua telah berhasil menjalankan fungsi utamanya sebagai instrumen peningkatan kualitas SDM melalui perluasan akses pendidikan tinggi bagi Orang Asli Papua. Program ini telah menghasilkan lulusan kompeten yang mampu berkontribusi dalam berbagai sektor profesional. Namun, efektivitas jangka panjang program masih memerlukan penguatan melalui kebijakan pasca-beasiswa, seperti pengembangan pusat karier alumni, program magang, peningkatan keterhubungan dengan sektor industri dan pemerintahan daerah, serta pemberian insentif bagi lulusan agar kembali berkontribusi di Papua. Dengan demikian, investasi pendidikan yang telah dilakukan oleh pemerintah dapat menghasilkan dampak pembangunan yang lebih besar dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan evaluasi dengan model CIPP (*Context, Input, Process, Product*) yang dikembangkan oleh Stufflebeam (1971), program ini telah memenuhi kebutuhan pendidikan tinggi bagi Orang Asli Papua (OAP). Sebagai inisiatif pemerintah untuk mengurangi kesenjangan pendidikan, program ini juga berfungsi sebagai investasi dalam sumber daya manusia. Keberhasilan program didukung oleh regulasi, pendanaan Otonomi Khusus (Otsus), dan kelembagaan pengelola, meskipun terkendala oleh perubahan kebijakan fiskal yang dapat mempengaruhi keberlangsungan program serta memerlukan peningkatan kapasitas dan transparansi kelembagaan. Proses pelaksanaan Program SUP terhambat oleh keterlambatan dana, koordinasi lembaga yang lemah, dan

kurangnya monitoring. Keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh komunikasi yang efektif, peningkatan koordinasi, serta prosedur administrasi yang baik. Di sisi produk, program ini berhasil meningkatkan akses pendidikan tinggi dan menghasilkan lulusan yang kompeten, meskipun banyak dari mereka belum berkontribusi kembali di Papua dan ada ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dan kebutuhan pasar kerja. Diperlukan penguatan program pasca-beasiswa melalui pendampingan alumni. Secara keseluruhan, walaupun Program SUP telah meningkatkan kualitas SDM OAP, perbaikan dalam tata kelola, pendanaan, dan implementasi sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan manfaat program, serta disarankan agar pemerintah memperbarui regulasi beasiswa, meningkatkan koordinasi antar lembaga, dan melibatkan orang tua dalam pengawasan mahasiswa.

REFERENSI

- Becker, G. S. (1964). *Human capital: A theoretical and empirical analysis, with special reference to education*. Columbia University Press.
- Borman, I., & Helmi, F. (2020). Sistem pendukung keputusan untuk rekomendasi penerima beasiswa menggunakan metode pengambilan keputusan multikriteria. *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, 7(3), 543–550.
- Dunn, W. N. (2003). *Public policy analysis: An introduction* (3rd ed.). Pearson Education.
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
- Hill, M., & Hupe, P. (2002). *Implementing public policy: Governance in theory and in practice*. SAGE Publications.
- Honadle, B. W. (1981). A capacity-building framework: A search for concept and purpose. *Public Administration*, 41(5), 575–580. <https://doi.org/10.2307/976270>
- Jubaidah, S. (2024). Analisis kebijakan pemberian beasiswa dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa kurang mampu. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 9(1), 1–12.
- Otto, R. (2023). Implementasi kebijakan Beasiswa Siswa Unggul Papua dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Orang Asli Papua. *Jurnal Administrasi Publik dan Pemerintahan*, 12(2), 85–98.
- Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Harvard University Press.
- Schultz, T. W. (1961). Investment in human capital. *The American Economic Review*, 51(1), 1–17.
- Stufflebeam, D. L. (1971). *Educational evaluation and decision making*. Peacock Publishers.
- Stufflebeam, D. L., Madaus, G. F., & Kellaghan, T. (2000). *Evaluation models: Viewpoints on educational and human services evaluation* (2nd ed.). Kluwer Academic Publishers.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic development* (12th ed.). Pearson Education.
- United Nations Development Programme. (1997). *Governance for sustainable human development*. UNDP.
- Utomo, A. P. (2020). Evaluasi program beasiswa pendidikan dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat kurang mampu. *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan*, 5(2), 120–130.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.



<https://doi.org/10.1177/009539977500600404>